

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Harahap, Yahya, M, S.H. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta

PT. Gramedia. 1988.

_____. *Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Beslag (sita Jaminan)*. Cet. I. Jakarta : S.N. 1987.

_____. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. 10. Jakarta : Djambatan. 2005.

_____. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Cet. 17. Jakarta : Djambatan. 2006.

Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Makarao, SH., MH. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. I. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2004.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta : Kencana. 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991.

Nasir Muhammad, Dr. SH. MH. *Hukum Acara Perdata*. Cet. II. Jakarta : Djambatan. 2005.

Parlindungan, A.P. *Komentar Undang-undang Tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996/09 April 1996/LN No. 42) dan Sejarah Terbentuknya*. Cet. 1. Bandung : CV. Mandar Maju. 1996.

_____. *Menjawab masalah pertanahan secara tepat dan tuntas*. Cet I. Bandung : Mandar Maju. 1992.

Poesoko Herowati, Dr. SH., MH. *Parate Executi Objek Hak Tanggungan*. Cet. I. Yogyakarta : Laksbang Presindo. 2007.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

_____. *Parate eksekusi sebagai Sarana mengatasi Kredit Macet*. Cet. I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*. Cet. I. Bandung : Penerbit Alumni. 1999.

Soebyakto. *Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata*. Cet. II. Jakarta : Djambatan. 1997.

Soemitro, Rachmat. *Peraturan dan Intruksi Lelang Staatsblaad 08 – 189 Peraturan Lelang/Vendu Reglement (Penjualan di Muka Umum di Indonesia) sebagaimana telah dirubah dengan Staatsblaad 40-56 juncto Staatblaad 41-3*. Bandung : Eresco. 1987.

Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*. Cet. VII. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1-9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006.

Soesilo,R. RIB / HIR Dengan Penjelasan.Bogor: Politea,1995

Subekti, Aneka Perjanjian Cet.X (Bandung: Alumni 1995)

_____, Hukum Perjanjian. Cet.Vi (Jakarta: Intermasa,1979)

_____, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet.XVI. (Jakarta:Intermasa, 1987)

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) Cet. XXI Diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Yakarta Pradnya Paramita, 2001)

Indonesia. *Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. Nomor 49 Prp Tahun 1960. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Negara Nomor 2104

Indonesia. *Undang-undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996.LN No.42 Tahun 1996

Indonesia. *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang_Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. PP No. 17 Tahun 1999. LN No. 30 Tahun 1999. TLN No.3814.

Keputusan Presiden. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara*. Nomor 21 Tahun 1991.

Keputusan Presiden. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Nomor 27 Tahun 1998.

Keputusan Presiden. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional*. Nomor 34 Tahun 1998

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Kepmen Nomor 337/KMK.08/2000.

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. *Keputusan Kepala tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara*. Nomor 38/PN/2000.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. Kepmen Nomor 61/KMK.08/2002.

Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. No. 40/PMK.07/2006.

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. Kepmen Nomor 61/KMK.08/2002.

3. ARTIKEL

“Membeli tapi tidak memiliki, kasus kepemilikan gedung Aspac”. Pleidoi (Nomor 10-Volume 1, 2007) : 26.

4. MAKALAH

Sutardjo, F. X. “Azas-azas yang Mendasari Lelang,” Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Lelang, Depok, Agustus – Desember 2006.

5. PUTUSAN

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt/2005. 31 Januari 2007.

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779K/Pdt/ 2004. 31 Januari 2007.

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 325/PDT/2004/PT.DKI23 Agustus 2004.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 20 April 2004 No.63/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL.

6. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Kebaikan Lelang . 18 Januari 2007. [http: www.djpln.depkeu.go.id](http://www.djpln.depkeu.go.id).